

PENGARUH LATAR BELAKANG *PERSONAL* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)

Sisri Melani¹, Rina Andriani², M. Irwan³

^{1,2,3}Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Email: sisrimelani21@gmail.com, rinaandriany85@gmail.com, muhdirwan120583@gmail.com

Article History

Received: 05-07-2025

Revision: 07-07-2025

Accepted: 18-07-2025

Published: 20-07-2025

Abstract. *This study aims to analyze the influence of the council's personal background and knowledge of the budget on the role of the DPRD in regional financial supervision. The population used in this study is all members of the Sawahlunto City Regional House of Representatives. The sampling method in this study is census. The data of this study was obtained from a questionnaire (primary). This study uses a quantitative approach and uses a causality type. The analysis used was multiple linear regression analysis with t-test and coefficient of determination. Partially, the results of the study are that personal background (personal background) has a positive and significant effect on the role of the DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by a significance value of less than 5% ($0.040 < 0.05$), while the council's knowledge of the budget does not have significant effect on the role of the DPRD in regional financial supervision, this is evidenced by a significance value greater than 5% ($0.639 > 0.05$). Based on the analysis of the coherence of determination (R^2), it is explained that 13.7 variables of the role of the DPRD in regional financial supervision are influenced by the variables of personal background (personal background) and the council's knowledge of the budget and the remaining 86.3% are influenced by other factors that were not studied in this study.*

Keywords: *Personal Background, Council Knowledge of the Budget, on of the DPRD in Regional Financial Supervision.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang *personal* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dan menggunakan tipe kausalitas. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji t dan koefisien determinasi. Secara parsial hasil penelitian yaitu Latar belakang *personal* (*personal backround*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,040 < 0,05$), sedangkan Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 5% ($0.639 > 0.05$). Berdasarkan analisis koefisien determinasi (R^2) menjelaskan bahwa 13.7 variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel Latar belakang *personal* (*personal backround*) dan Pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya 86,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Latar Belakang Personal, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif mempunyai peran penting dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping pemda.

Latar belakang *personal* merupakan latar belakang diri yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini mencakup banyak aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, usia, partai politik, dan jaringan sosial, bisa mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas pengawasan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karena harus dipastikan sumber daya manusia ini wajib dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pengetahuan yang mendalam tentang anggaran daerah sangat penting bagi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Anggota dewan yang memahami tentang anggaran dengan baik bisa menganalisis anggaran, mengevaluasi program kegiatan, dan membuat keputusan yang tepat. Di samping itu pengaruh terhadap peran DPRD dapat mempengaruhi kualitas pengawasan, pengambilan keputusan, dan kerja sama dengan pemerintah.

Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota, sebab daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan dan merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja.

Tabel 1. 1
APBD Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023

Tahun	Defisit dan Surplus	Keterangan
2018	(Rp 105.000.000.000)	Belanja kegiatan meningkat dan adanya kekurangan dana akibat pemotongan (4% awal tahun, 8% dari DAU).
2019	(Rp 34.565.000.000)	Belanja tidak langsung bertambah (gaji pegawai Rp 464.784.000) serta belanja tunjangan kinerja ASN.
2020	Rp 32.594.000.000	Pemisahan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang tidak terealisasi semua.
2023	(Rp 79.000.000.000) (Rp 66.000.000.000)	Pendapatan rendah dan belanja tinggi, juga karena kurangnya manajemen keuangan.

Sumber: BPK 2025

Pada pertengahan tahun 2018, Kota Sawahlunto mengalami defisit sebesar Rp105.000.000.000. Hal itu disebabkan beberapa item kegiatan yang bertambah. (Sumber: <https://sumbar.bpk.go.id/sawahlunto-defisit-rp-105-miliar>). APBD Perubahan 2019 yang diajukan Pemerintah Kota Sawahlunto defisit sebesar Rp34,565 miliar. Meningkatnya sektor belanja pada belanja tak langsung dan turun penerimaan pada retribusi mendorong tumbuhnya angka defisit. (Sumber: <https://sumbar.bpk.go.id/apbd-perubahan-sawahlunto-defisit-rp565-miliar/>). Pada tahun 2020 Belanja Daerah Sawahlunto surplus sebesar Rp32.594.000.000 dari sisa lebih pembiayaan anggaran Rp44.069.000.000. <https://sumbar.bpk.go.id/belanja-daerah-sawahlunto>. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto Afridarman memberitahukan bahwasanya defisit senilai Rp79.000.000.000. Sumber: <https://www.fajarsumbar.com /2023/09/kondisi-keuangan-kota sawahlunto gawat.html>.

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi, pengetahuan dewan tentang anggaran. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif pada pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena latar belakang anggota DPRD tersebut atau pengetahuan anggota DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah.

Berdasarkan *fenomena* yang terjadi di DPRD Kabupaten/Kota Sawahlunto dan belum konsistennya hasil penelitian-penelitian terdahulu serta masih sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, disamping juga masih terbatasnya penelitian di sektor publik, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Latar Belakang *Personal* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kota Sawahlunto)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan

masalah penelitian sebagai berikut: Apakah latar belakang *personal* berpengaruh

signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto? Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Pengertian dan Peran DPRD

Pengertian DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Khamim (2021;2) Peran DPRD di daerah yang berpengaruh dalam proses perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana konstelasi politik membawa harapan dan prioritas program yang merupakan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi untuk melihat kesiapan daerah dalam membangun struktur pemerintahan baru melalui aplikasi peran dan fungsi DPRD sebagai institusi politik daerah.

2.1.2 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah

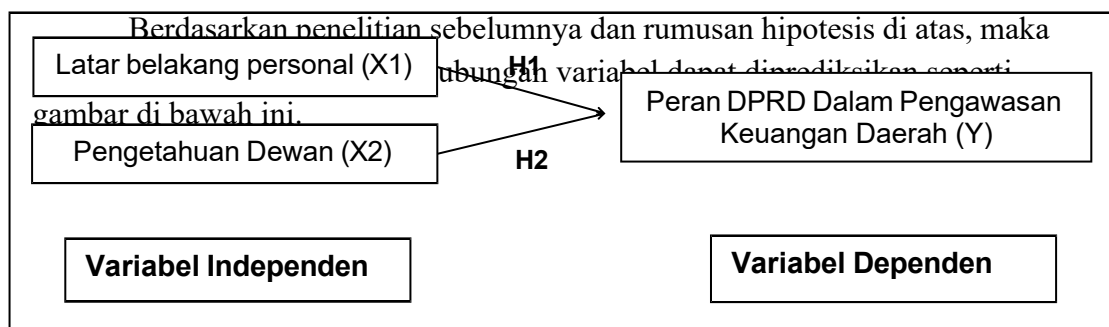
Menurut Andri dan Khotami (2018;149) Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Stoner, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan agar tercapai secara efisien dan efektif maka dibutuhkan suatu sistem pengawasan yang baik. Sama pentingnya dengan perencanaan dan pelaksanaan program, dimana

pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi manajemen. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan dalam tahap pelaksanaan. Artinya aspek pengawasan telah masuk selagi proyek-proyek pembangunan masih dalam tahap perencanaan

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Personal background adalah latar belakang diri yang melekat pada individu. Latar belakang diri ini memiliki banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini personal background yang dimaksud adalah personal background dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pengalaman pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan.

2.1.5 Model Penelitian



sumber: Welly Sasra Yuliani 2020

(Gambar 2. 1 Model Penelitian)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam model penelitian di atas, maka peneliti membuat hipotesis penelitian ini sebagai berikut

- H1: Latar belakang personal berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah
- H2: Pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut Hermawan (2016:26) kausal adalah salah satu tipe dari penelitian konklusif di mana tujuan utamanya adalah untuk mencari hubungan sebab akibat. Jadi variabel bebas/independen yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi adalah variabel terikat/dependen. Penelitian dengan judul pengaruh latar belakang *personal* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi pada DPRD Kota Sawahlunto) ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis dengan melakukan observasi langsung dan membagikan kuesioner pada lokasi penelitian, yaitu kantor DPRD Kota Sawahlunto.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Sawahlunto, Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2024.

3.3 Teknik Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut Indriantoro (2018:113) yaitu sekelompok orang, (satuan-satuan atau individu-individu) kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan Kota Sawahlunto berjumlah 20 orang periode 2024-2029.

3.3.2 Sampel

Menurut Indriantoro (2018:113) Sampel adalah seluruh elemen (bagian-bagian) populasi atau sebagian populasi. Sampel dipilih dari para anggota DPRD Kota Sawahlunto yang berjumlah 20 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan Kota Sawahlunto periode 2024-2029.

3.4 Jenis & Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jenis data penelitian ini bersumber dari, yaitu:

- a) Data primer, Menurut Indriantoro (2018:142) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti buat menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan

kepada responden.

- b) Data sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro 2018:142). Menjadi suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (*score*). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor DPRD Kota sawahlunto.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang auditing yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Mengakses *Website* dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

uji validitas digunakan sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2013: 52).

3.5.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:82)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbias Estimate). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Hipotesis

Dalam menguji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. Menurut (Ghozali, 2005) analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan salah satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan:

Dimana: Y = Peran DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah

A = konstanta

B = koefisien regresi

X 1 = Latar belakang personal

X 2 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

e = error

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Pengaruh Latar Belakang Personal (Personal Background) Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji hipotesis diatas, yaitu latar belakang *personal* (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ini berarti semakin baik latar belakang *personal* (*personal background*) anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga akan semakin maksimal.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $>$ t tabel $(2,225) > (2,110)$ dengan nilai signifikan sebesar 0,040. Nilai signifikan kurang dari 0,05, ini menunjukkan variabel yaitu latar belakang *personal* (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Latar belakang *personal* (*Personal background*) merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi

Adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai *personal background* dan pekerjaan yang berbeda

sebelum menjadi anggota DPRD.

Dalam pendekatan behaviorisme, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Personal background berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianda (2016) hasil penelitiannya menunjukkan *personal background* tidak berpengaruh terhadap terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

4.2 Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan uji hipotesis diatas, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, penolakan hipotesis H2 memberikan wawasan penting bahwa pengetahuan anggaran saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh DPRD. Perlu dilihat faktor-faktor lain yang mungkin memiliki peran lebih besar.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $> t$ tabel $(-0,478) > (2,110)$ dengan nilai signifikan sebesar 0,639. Nilai signifikan besar dari 0,05, ini menunjukkan variabel yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif Fungsi pengawasan DPRD membenarkan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah. DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh

anggota DPRD Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dan kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dan pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Choyrun (2016) hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2020) hasil penelitiannya menunjukkan Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0.002 < 0.05$).

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang *personal* (*personal background*) dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang *personal* (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto dengan pengujian sebesar 1,821 tingkat signifikan sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang *personal* (*personal background*) anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Sawahlunto. Hal Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran signifikan mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian berikutnya antara lain:

1. DPRD Kota Sawahlunto diharapkan lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tanpa ada korupsi di pemerintahan yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini.
2. Variabel yang di uji di penelitian ini hanya sebagian kecil dari sekian banyak variabel yang berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat diteliti variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan sampel yang lebih besar agar hasil penelitian dapat maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan item pernyataan atau indikator pada keusioner.
5. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andri, Alsar, dan Khotami. 2018. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Husain, Fauziah. 2021. *Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja, dan Transparansi*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher.
- Khamim, Mohammad. 2021. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Nurkholis, dan Moh Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Gorontalo: UB Press.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sagala, Syaiful. 2016. *Memahami Organisasi Pendidikan Budaya dan Reinventing Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suwanda, Dadang, dan Akmal Malik Piliang. 2016. *Penguat Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati. 2024. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: R Tujuh Media Printang.
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah*. MNC: Malang.

Keputusan presiden, Menteri dan Peraturan undang-undang :

- Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Prosedur dan Langkah Dalam Proses Penyusunan Anggaran.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD

Jurnal:

- Choyrun Nisa, R. I. (2016). Pengaruh Personal Background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)(Studi Empiris terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi). *Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*.
- Friantama, P., & Mukhzarudfa. (2018). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan

- Daerah (Apbd) DenganPartisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik SebagaiVariabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprd Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*
- Hidayah, C. (2020). *Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019*. [http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10046%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10046/1/Skripsi Final CITRA HIDAYAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10046%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10046/1/Skripsi%20Final%20CITRA%20HIDAYAH.pdf)
- Nuarta, M. (2014). *Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah(APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)*.
- Rosy Oktasari. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar*.
- Sari, D. U. (2015). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten Solok)*.
- Sari,Imelda. (2017). *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kota Padang)*.
- Sari, I. (2019). *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang DalamPengawasan Keuangan Daerah*.
- Silooy, R. W. (2022). *Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kota Tual)*. *Jurnal Akuntansi*
- Yuliani, W. S. (2021). *Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)*. *Juhanperak*
- Diskhamarzaweny, D., Irwan, M., & Dewi, D. K. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi*. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 4(1), 35-49.
- Diskhamarzaweny, D., Dewi, D. K., & Irwan, M. (2023). *Pengaruh Self-Determination, Self-Esteem, Self-Efficacy, Optimisme, dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Pelaku Umkm Di Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Applied Business Administration*, 7(1), 31-40.
- Diskhamarzaweny. (2023). *The Role of Experiential Marketing, Perceived Value, and Sharia Service Quality as Determinants of Customer Satisfaction*. *Ilomata International Journal of Management*, 4(3), 386-400.
- Diskhamarzaweny, D., Andriani, R., Sapridawati, Y., & Yulis, Y. E. (2023). *The Effect Of Trust, Perceived Risk, And Lifestyle On Online Purchase Decisions In E-Commerce*. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research (IJEIR)*, 2(2), 151-166.
- Irwan, M., Diskhamarzaweny, D., & Yulis, Y. E. (2024). *Evaluation Analysis Of*

Internal Control Of The Cash Expenditure Accounting System In Bumdes Harapan Makmur, Tebing Tinggi Village. *International Journal of Business and Quality Research (IJBQR)*, 2(3), 180-191.

Yulis, Y. E., Andriani, R., Diskhamarzaweny, D., Sepridawati, Y., & Irwan, M. (2025). The Effect of The Use of Accounting Information, Utilization of Information Technology, and Loan Capital on the Performance of Micro, Small, and Medium enterprises in Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 10(01), 64–71.

Dewi, D. K., Ammar, Z., & Diskhamarzaweny, D. (2020). Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional, Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Kabupaten Kuantan Singingi). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 57-67.

Dewi, D. K., & Diskhamarzaweny, D. (2021). Pengaruh Etika Profesi, Kecerdasan Emosional, Due Professional Care dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 15-25.

Website:

<https://sumbar.bpk.go.id/sawahlunto-defisit-rp-105-miliar>

<https://sumbar.bpk.go.id/belanja-daerah-sawahlunto>

<https://www.fajarsumbar.com/2023/09/kondisi-keuangan-kotasawahlunto-gawat.html>